Kernel for Word to PDF Demo

BAB III

PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

Kernel for Word to PDF Demo

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Kernel for Word to PDF Demo

Dalam pelaksanaan kerja praktek pada Pemerintah Kota Bandung, penulis ditempatkan di bagian pajak penetapan.Penulis bertujuan untuk memperoleh informasi tentang aktifitas pemungutan pajak air tanah pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

Kernel for Word to PDF Demo

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Selama pelaksanaan kerja praktek di Pemerintah Kota Bandung pada Dinas Pelayanan Pajak dari tanggal 15 Juli 2013 sampai 15 Agustus 2013, adapunkegiatan penulis selama kerja praktek adalah:

Kernel for Word to PDF Demo

1. Menyusun SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) untuk pajak bumi dan bangunan.

Kernel for Word to PDF Demo

2. Mengarsipkan data–data pajak bumi dan bangunan dan pajak air tanah yang telah dibayar.

Kernel for Word to PDF Demo

3. Menginput data–data pajak bumi dan bangunan kedalam komputer sebagai arsip.
4. Mencatat data–data pajak air tanah yang telah dibayar.

Kernel for Word to PDF Demo

Kernel for Word to PDF Demo

Kernel for Word to PDF Demo

3.3 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Hal yang paling mendasar dalam pajak air tanah adalah pajak. Definisi pajak Menurut **Racmat Soemitro (2007;1)** Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sementara itu **Erly Sunandi (2000; 1)** mengemukakan bahwa Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditujukan dalam hal yang individual dan dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.Berdasarkan beberapa definisi tersebut penulis menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang dikeluarkan oleh masyarakat yang diberikan kepada Negara yang sifatnya memaksa sesuai peraturan yang telah dibuat untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang manfaatnya tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Selanjutnya hal yang yang terkandung dalam pajak adalah pajak daerah.Dalam **Undang- Undang No. 28 tahun 2009** mendefinisikan Pajak Daerah adalahkontribusi wajib kepadaDaerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksaberdasarkanUndang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsungdan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.. Sementara itu menurut **Mardiasmo (2001; 93)** mengemukakan bahwa pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yangditetapkan oleh daerah melalui peraturan daerah untuk kepentingan pembiayaanrumah tangga pemerintah daerah.

Kernel for Word to PDF Demo

Kernel for Word to PDF Demo

Berdasarkan pengertian di atas Pajak Daerah adalah iuran yang dilakukandengan tanpa imbalan secara langsung yang digunakan untuk membiayaipenyelenggaraan Pemerintah Daerah.Adapun fungsi dari pajak daerah antara lain:

Kernel for Word to PDF Demo

1. Sebagai tiang utama pelestarian otonomi terhadap penyelenggara Pemerintah Daerah.

Kernel for Word to PDF Demo

2. Sebagai sumber dana yang sangat berarti dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah.

Kernel for Word to PDF Demo

Sesuai UU no.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah:

1. Pajak Provinsi terdiri dari:

Kernel for Word to PDF Demo

   a. Pajak Kendaraan Bermotor;
   b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
   c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

Kernel for Word to PDF Demo

   d. Pajak Air Permukaan; dan
   e. Pajak Rokok.

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

Kernel for Word to PDF Demo

   a. Pajak Hotel;
   b. Pajak Restoran;
   c. Pajak Hiburan;

Kernel for Word to PDF Demo

   d. Pajak Reklame;
   e. Pajak Penerangan Jalan;
   f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Kernel for Word to PDF Demo

Kernel for Word to PDF Demo

g. Pajak Parkir;

h. Pajak Air Tanah;

Kernel for Word to PDF Demo

i. Pajak Sarang Burung Walet;

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Kernel for Word to PDF Demo

Dalam pajak daerah, terdapat pajak air tanah.Pajak air tanah adalah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.Objek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau

Kernel for Word to PDF Demo

pemanfaatan air tanah.Objek yang dikecualikan dari pajak air tanah adalah:

1. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta

Kernel for Word to PDF Demo

peribadatan; dan

2. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah. (Sumber: UU No.28 Tahun 2009)

Kernel for Word to PDF Demo

Dasar pengenaan pajak air tanah adalah NPA (Nilai Perolehan Air) Yaitu nilai air bawah tanah yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan HDA (Harga

Kernel for Word to PDF Demo

Dasar Air) yang sudah dihitung oleh BPLH (Badan Pengelola Lingkungan Hidup). Tarif untuk pajak air tanah telah ditetapkan sebesar 20%.

Berdasarkan hasil kerja praktek yang dilakukan di Dinas Pelayanan Pajak

Kernel for Word to PDF Demo

Kota Bandung maka penulis akan membahas beberapa kajian sebagai berikut:

Kernel for Word to PDF Demo

Kernel for Word to PDF Demo

3.3.1 Objek Pajak Air Tanah

Definisi air tanah adalah air yang berasal dari bawah tanah. Pajak air tanah menurut UU no. 28 tahun 2009 menyatakan bahwa pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Subjek dari pajak air tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Definisi dari pengambilan air tanah adalah proses seseorang untuk mengambil air yang terletak di bawah tanah. Hal yang biasa dilakukan dalam pengambilan air tanah adalah dengan cara mengebor tanah agar mencapai lapisan tanah tertentu yang terdapat air.

Sedangkan definisi pemanfaatan air tanah adalah perbuatan memanfaatan air yang berasal dari bawah tanah untuk tujuan tertentu. Contoh pemanfaatan air tanah seperti:

1. Pemakaian sendiri (kebutuhan rumah tangga,memcuci motor,dll) .
2. Pemakaian bersama (irigasi, MCK, dll).
3. Dijual kembali (air minum dalam kemasan)

Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.Contoh objek yang dikenakan pajak air tanah adalah:

1. Perusahaan air minum
2. Pabrik
3. Pasar Swalayan
4. Kolam renang umum.
5. Hotel,dll

Kernel for Word to PDF Demo

Kernel for Word to PDF Demo

Objek yang dikecualikan dari pajak air tanah ada 2(dua) hal yaitu:

1. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.

   Contohnya seperti:

   a. MCK (Mandi Cuci Kakus)
   b. Irigasi pertanian
   c. Penunjang peribadatan

2. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah. Contohnya seperti:

   a. penanggulangan bahaya kebakaran seperti pembuatan *hydrant* sebagai antisipasi kebakaran.

3.3.2 Aktifitas Pemungutan Pajak Air Tanah

Pemungutan pajak air tanah pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung menggunakan *Official Assesment System* yang artinya besaran nilai pajak yang harus dilunasi oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus. Adapun aktifitas pemungutan pajak air tanah pada Dinas Pelayanan Pajak dijelaskan sebagai berikut:

A. Nota Pengantar Perhitungan Pajak (NPPP) diproses atas dasar pengajuan permohonan dari pemohon/ wajib pajak yang akan dan telah siap melaksanakan pembayaran pajak air tanah

Kernel for Word to PDF Demo

1. Pemohon/ wajib pajak mengajukan permohonan SKPD dengan melaksanakan pendaftaran dengan mengisi formulir pendaftaran wajib pajak dan dalam pengisian SPTPD sesuai dengan NPPP dan ditandatangani oleh pemohon/ wajib pajak.
2. Setelah diterima, diteliti kebenarannya, diperiksa kelengkapannya, petugas penerima/administrasi membuat himpunan rekapitulasi penerbitan SPTPD, setelah Itu berkas permohonan beserta kelengkapannya diteruskan ke kepala seksi pelayanan dan pengaduan untuk ditandatangani dan berkas diarsipkan.
3. Selanjutnya berkas permohonan diteruskan/ diserahkan kepada seksi penetapan dan pembukuan melalui pengolahan data untuk dibuat ketetapan pajaknya dengan menerbitkan SKPD. Nilai pada SKPD adalah sebesar NPA x 20%. Berkas SKPD dicatat secara manual dan diberi nomor kohir oleh petugas pencatat pembukuan. SKPD diserahkan melalui pelayanan kepada pemohon/ wajib pajak untuk segera melakukan pembayaran dengan terlebih dahulu mengisi formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dengan dasar SKPD.

Kernel for Word to PDF Demo
Kernel for Word to PDF Demo
Kernel for Word to PDF Demo
Kernel for Word to PDF Demo
Kernel for Word to PDF Demo
Kernel for Word to PDF Demo
Kernel for Word to PDF Demo

Kernel for Word to PDF Demo

4. Pemohon/ wajib pajak melakukan pembayaran di BKP. Berkas SKPD dan SSPD yang telah divalidasi oleh BKP diterima oleh pemohon/ wajib pajak dikembalikan/diperlihatkan ke petugas pelayanan/ administrasi yang selanjutnya diteruskan kepada seksi penetapan dan pembukuan untuk proses penandatanganan SKPD dan kelengkapannya.
5. Oleh petugas pencatatan pembukuan, berkas SKPD dan kelengkapannya diajukan kepada Kepala Seksi Penetapan dan Pembukuan untuk ditandatangani himpunan SKPD dan pembubuhan paraf pada SKPD dengan tanda bukti pembayaran (SSPD)
6. Selanjutnya diteruskan kepada Kepala Bidang Pajak Penetapan untuk proses penandatanganan SKPD dan kelengkapannya. Setelah ditandatangani berkas SKPD dan kelengkapannya, dikembalikan kepadaseksi penetapan dan pembukuan untuk dibubuhhi cap/ stempel sebagai legalisasi dan selanjutnya diserahkan SKPD dan SSPD nya kepada wajib pajak/ pemohon melalui pelayanan.

Kernel for Word to PDF Demo
Kernel for Word to PDF Demo
Kernel for Word to PDF Demo
Kernel for Word to PDF Demo
Kernel for Word to PDF Demo
Kernel for Word to PDF Demo
Kernel for Word to PDF Demo
Kernel for Word to PDF Demo

Kernel for Word to PDF Demo

3.3.3 Kendala dan solusi pada aktifitas pemungutan pajak air tanah pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

Kernel for Word to PDF Demo

Dalam pemungutan pajak air tanah yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung terdapat beberapa kendala yang sering terjadi. Kendala yang sering terjadi adalah:

Kernel for Word to PDF Demo

1. Masih terdapat adanya kesalahan pencatatan data pajak air tanah yang sudah dibayar, dan
2. Sistem pencatatan data sebagian masih manual dalam artian masih ditulis tangan dan belum semuanya terkomputerisasi.

Kernel for Word to PDF Demo

Adapun upaya – upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

Kernel for Word to PDF Demo

1. Peningkatan kinerja para pegawai agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan data.
2. Memperbaharui sistem pencatatan data dengan sistem yang terbaru dan optimalisasi sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemungutan pajak.

Kernel for Word to PDF Demo

Dengan diterapkannya sistem yang baik terhadap aktifitas pemungutan pajak dan didukung oleh dinas- dinas terkait, Disyanjak diharapkan mampu mengelola dengan baik pendapatan pajak daerahnya untuk memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah.

Kernel for Word to PDF Demo

Kernel for Word to PDF Demo

Kernel for Word to PDF Demo

Dari evaluasi aktifitas pemungutan pajak air tanah diatas, dapat disimpulkan bahwa Disyanjak sudah melaksanakan pemungutan pajak air tanah dengan baik hanya saja terkadang terjadi kesalahan pada pencatatan untuk arsip. Untuk mengatasi hal tersebut sebaiknya kinerja para pegawai Disyanjak lebih ditingkatkan lagi agar aktifitas pemungutan pajak air tanah berjalan dengan baik.

Kernel for Word to PDF Demo
Kernel for Word to PDF Demo
Kernel for Word to PDF Demo
Kernel for Word to PDF Demo
Kernel for Word to PDF Demo
Kernel for Word to PDF Demo
Kernel for Word to PDF Demo